

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: BOS Nontunai Hanya untuk Nominal di Atas Rp 10 Juta
Entitas / Cakupan	: Kabupaten Bandung
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat/Hal.19
Edisi	: Rabu, 14 Maret 2018

BOS Nontunai Hanya untuk Nominal di Atas Rp 10 Juta

SOREANG, (PR).-

Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung mengatakan, sekolah-sekolah tidak perlu khawatir dengan adanya ketentuan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah yang harus nontunai. Hal itu disebabkan aturan nontunai di Kabupaten Bandung sudah direvisi sehingga hanya pembelian barang atau jasa di atas Rp 10 juta yang harus nontunai.

"Peraturan bupati tentang penyaluran anggaran dari APBD Kabupaten Bandung harus nontunai sudah direvisi sehingga tidak semua nontunai," kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Juhana, di ruang kerjanya, Senin (12/3/2018).

Diberitakan sebelumnya, pihak sekolah menyambut baik adanya kenaikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah untuk siswa SD/MI maupun SMP/MTs pada tahun 2018 ini. Namun, penyaluran BOS Kabupaten Bandung harus nontunai dengan cara transfer sehingga dikeluhkan banyak pihak.

Lebih jauh, Juhana mengatakan, penyaluran anggaran secara nontunai apabila pemakaiannya untuk pembelian barang atau jasa di atas Rp 10 juta. "Honorarium guru merupakan alokasi jasa yang dibayarkan pihak sekolah dari dana BOS daerah. Kalau jumlah pembayaran masing-masing guru kurang dari Rp 10 juta, bisa dengan cara tunai," ujarnya.

Penyaluran BOS daerah setiap semester sehingga pembayarannya pun dirapel setiap enam bulan. Misalnya, ada guru yang mendapatkan honorarium Rp 1 juta/bulan atau Rp 6 juta per semester, sehingga masih di bawah ketentuan nontunai Rp 10 juta.

"Akibat informasi yang simpang siur, para guru membuat rekening bank agar bisa menerima BOS daerah. Padahal untuk membuat rekening bank *kan* harus ada dana setoran awal minimal Rp 100.000," ujarnya.

Anggota DPRD Kabupaten Bandung, Yanto Setianto mengatakan, penyaluran dana APBD dengan cara nontunai alias ditransfer seharusnya ditanggapi sekolah secara positif karena menekan adanya upaya pemotongan honorarium guru. "Dengan pembayaran secara nontunai, tidak ada potongan-potongan honor yang berbeda dengan pembayaran secara manual atau tunai," katanya.

Selain itu, dengan cara nontunai juga memudahkan dalam laporan pertanggungjawaban BOS, sebab ada tanda bukti transfer dana dari pihak bank. "Dengan demikian, mutasi dalam rekening terpantau dengan jelas dan memudahkan dalam pengawasannya," katanya. **(Sarnapi)*****